



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO**

Jalan Bypass Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kabupaten Gorontalo 96163

Telepon: (0435) 8525999, Faksimile: (0435) 8525888

E-mail: gorontalo@bpkp.go.id, Website: www.bpkp.go.id/gorontalo.bpkp

Nomor : PE.12.03/LHP- 292/PW31/3/2022 7 Desember 2022
Lampiran : 3 Berkas
Perihal : Laporan Hasil Reviu Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri
(P3DN) Pada Pemerintah Provinsi
Gorontalo Triwulan IV Tahun 2022

**Yth. Penjabat Gubernur Gorontalo
di Gorontalo**

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Pemerintah Provinsi Gorontalo Triwulan IV Tahun 2022 dengan *cut off* per 30 November 2022. Reviu dilakukan sesuai dengan Standar Audit Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Reviu dilaksanakan mulai tanggal 21 November 2022 sampai dengan 1 Desember 2022, dengan uraian sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Perjanjian Kerja Sama antara Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 119/2705/IJ dan PRJ-002/D3/4/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah;
5. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor PE.12.02/ST-1080/PW31/3/2022 tanggal 17 November 2022.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Reviu P3DN pada Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah untuk:

1. Memberikan hasil analisis atas kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri, baik dari sisi yang mendorong permintaan (*demand*) produk dalam negeri (PDN), mendorong penyediaan (*supply*) PDN, dan perluasan kapasitas dan kemudahan pasar (*market*) PDN;
2. Memberikan hasil analisis atas komitmen pengalokasian belanja daerah kepada PDN oleh Pemda;
3. Memberikan hasil analisis atas realisasi komitmen belanja Pemda pada PDN;
4. Mengidentifikasi permasalahan pengutamaan PDN; dan
5. Memberikan saran-saran perbaikan atas permasalahan yang ditemukan.

Sasaran reviu adalah kebijakan dan implementasi belanja Pemda yang dialokasikan untuk belanja PDN, serta realisasi penggunaan PDN dalam belanja Pemda.

C. Ruang Lingkup dan Batasan Tanggung Jawab

1. Ruang lingkup kegiatan adalah Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Pemerintah Provinsi Gorontalo sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 dengan *cut-off* per 30 November 2022.
2. Ruang lingkup reviu meliputi:
 - a. Analisis kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo baik dari sisi *supply*, *demand*, dan *market* yang mendorong P3DN;
 - b. Analisis komitmen dan realisasi belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dialokasikan untuk P3DN;
 - c. Analisis kepatuhan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam implementasi P3DN;
 - d. Validasi perhitungan realisasi PDN dan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).
 - e. Ruang lingkup kegiatan tidak termasuk proses pengadaan barang/jasa (PBJ) serta pembayarannya.
3. Batasan Tanggung Jawab
Data komitmen dan realisasi penggunaan PDN pada PBJ yang direviu merupakan tanggung jawab manajemen Pemerintah Provinsi Gorontalo.

BPKP dan/atau APIP Daerah bertanggung jawab pada hasil revidu berdasarkan data yang disampaikan oleh manajemen Pemerintah Provinsi Gorontalo.

D. Metodologi

Metodologi yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah:

1. Pengumpulan dan pengolahan data;
2. Analisis data dan kebijakan;
3. Observasi;
4. Wawancara dan permintaan keterangan atas implementasi P3DN dalam PBJ daerah.

E. Simpulan Revidu

Nilai PBJ Pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah diumumkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan Data Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PMEP-LKPP) s.d. 30 November 2022 sebanyak 6.501 paket dengan nilai sebesar Rp730.615.298.545,00. Dari hasil revidu PBJ, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai PBJ direncanakan menggunakan PDN sebanyak 5.269 paket dengan nilai sebesar Rp614.998.985.754,00 atau 84,18% dari nilai PBJ RUP.
2. Nilai realisasi PBJ dalam bentuk komitmen, jumlah kontrak/SPK/SPB/ dokumen yang dipersamakan adalah senilai Rp482.769.887.108,00 atau 66,08% dari PBJ RUP, dengan nilai PDN sebesar Rp337.823.326.725,00 atau 46,24% dari PBJ RUP.

Rendahnya nilai realisasi realisasi PBJ dan realisasi PDN PBJ disebabkan antara lain:

- a. Gagal tender pada beberapa paket pengadaan sehingga proses pengadaan memakan waktu lebih lama;
- b. Adanya revidu atas beberapa paket pada dokumen perencanaan pengadaan dan persiapan pengadaan sehingga proses perbaikan menjadi berkepanjangan;
- c. Keterlambatan pada banyak tender sehingga terjadi penumpukan di satu periode tertentu sedangkan Pokja Pemilihan memiliki keterbatasan jumlah personil sehingga proses revidu/kualifikasi memerlukan waktu yang lama;

d. Proses sanggah oleh penyedia yang berkepanjangan.

3. Validasi atas nilai PDN dan TKDN.

Dari nilai realisasi PDN dalam bentuk komitmen kontrak/dokumen yang dipersamakan tersebut telah dilakukan uji petik atas validasi perhitungan nilai PDN dan TKDN, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Nilai PDN validasi menunjukkan 61,73% realisasi PDN yang merupakan PDN.
- b. Nilai TKDN hasil validasi menunjukkan bahwa dari klaim PDN besaran TKDN yang bisa dihitung sebesar 73,98%.

TKDN dianggap valid apabila memenuhi salah satu dari empat kriteria: 1).memiliki sertifikat TKDN; 2).terdapat pernyataan penyedia; 3).terdapat perkiraan perhitungan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); atau 4).perhitungan Tim P3DN Pemda.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa sampai dengan akhir November 2022, Program P3DN pada Provinsi Gorontalo relatif berjalan sebagaimana diharapkan yang diindikasikan dari hal berikut:

1. Nilai realisasi PDN dalam bentuk kontrak/dokumen lain yang dipersamakan mencapai 66,08% (Rp482.769.887.108,00) dari PBJ RUP (Rp730.615.298.545,00);
2. Hasil validasi perhitungan PDN menunjukkan keakuratan perhitungan PDN 61,73% dari nilai yang diuji petik (Rp89.018.787.200,00 dari Rp144.217.938.845,00) dan keakuratan perhitungan TKDN mencapai 73,98% (Rp75.279.123.320,00) dari nilai klaim PDN yang diuji petik (Rp101.749.839.713,00).

Dengan demikian, jika hasil uji petik tersebut diproyeksikan terhadap realisasi PDN sampai 30 November 2022, maka nilai realisasi PDN adalah sebesar Rp297.990.598.124,00 atau 40,79% dari nilai PBJ RUP, sedangkan nilai TKDN sebesar Rp295.451.019.919,00 atau 40,44% dari nilai PBJ RUP.

F. Uraian Hasil Reviu

1. Reviu Kebijakan P3DN

a. Institusionalisasi P3DN

Pemerintah Provinsi Gorontalo telah memiliki atau menetapkan Tim P3DN Daerah dengan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 123/4/III/2022 tanggal 23 Maret 2022. Reviu atas struktur organisasi, tugas dan fungsi Tim P3DN tersebut sebagai berikut:

- 1) Struktur organisasi Tim P3DN Provinsi Gorontalo **telah** sesuai dengan Pasal 74 PP Nomor 29 Tahun 2018 yaitu terdiri dari unsur Pemda dan dunia usaha;
- 2) Tugas Tim P3DN, berdasarkan SK, **belum sepenuhnya** sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 dan angka 1 Lampiran Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 yaitu:
PP Nomor 29 Tahun 2018:
 - a) **Telah** melakukan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan PDN di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
 - b) **Belum** berfungsi dalam memberi tafsiran final atas permasalahan kebenaran nilai TKDN antara produsen Barang atau penyedia Jasa dengan tim PBJ;
 - c) Telah melakukan tugas lain yang terkait dengan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, sebagai berikut:
 - (1) Melakukan promosi dan sosialisasi mengenai Produk Dalam Negeri, mendorong Pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan dan kegemaran menggunakan PDN serta memberikan akses informasi Produk Dalam Negeri;
 - (2) Mengawasi implementasi konsistensi nilai TKDN pada produk barang/jasa berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh produsen barang/jasa yang bersangkutan;
 - (3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Angka 1 Lampiran SEB Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 terkait tugas tim P3DN, yaitu

belum ada penugasan terkait melakukan pemetaan PDN yang berada di daerahnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim P3DN **belum** memiliki rencana kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan hasil revidi, Tim P3DN Pemerintah Provinsi Gorontalo belum efektif menjalankan tugas-tugasnya. Hal tersebut dikarenakan:

- a) Tim P3DN belum didukung dengan anggaran operasional yang cukup untuk menjalankan kewenangannya;
- b) Kurangnya pemahaman Tim P3DN terkait implementasi P3DN dalam belanja modal, barang dan jasa.

b. Dukungan terhadap Aspek *Demand*

Dukungan Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap Aspek *Demand*, antara lain:

- 1) Pemerintah Provinsi Gorontalo **telah** memiliki kebijakan terkait keberpihakan/perlindungan/penggunaan produk lokal dalam mendorong produktivitas dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) yang tertuang dalam Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 027/BP/2100/VII/2021 tanggal 12 Juli tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Bela Pengadaan di Provinsi Gorontalo yang memuat:
 - a) Para Pimpinan/kepala OPD untuk memfasilitasi/mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil untuk mendaftar ke *e-marketplace* pada Program Bela Pengadaan;
 - b) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang dapat disediakan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil serta menginstruksikan KPA/PPK dan Pejabat Pengadaan agar segera melakukan pengadaan langsung dengan memanfaatkan Aplikasi Bela Pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c) Menyesuaikan ketentuan pertanggungjawaban keuangan sehingga dapat memfasilitasi transaksi melalui *e-marketplace*/Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) pada Aplikasi Bela Pengadaan.

- 2) Pemerintah Provinsi Gorontalo **belum** menetapkan kebijakan PDN sebagai salah satu kriteria kinerja organisasi perangkat daerah. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman Pemda terkait pentingnya penggunaan PDN untuk meningkatkan kemandirian perekonomian nasional pasca pandemi pada umumnya dan daerah pada khususnya melalui P3DN serta peningkatan perekonomian UMKK.

c. Dukungan terhadap Aspek *Supply*

Pemerintah Provinsi Gorontalo **telah** memiliki kebijakan yang mendukung Aspek *Supply* PDN, yaitu Surat Edaran Gubernur Gorontalo Nomor 027/SET-BP/726/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pemanfaatan Aplikasi Bela Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Surat Edaran tersebut mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggunakan Aplikasi Bela Pengadaan sebagai bagian dari upaya mendukung Usaha Mikro Kecil *Go Digital* melalui Proses Belanja Langsung Pemda sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta). Selain itu, Pimpinan OPD diinstruksikan agar berkoordinasi dengan Biro PBJ Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo untuk kelancaran pemanfaatan Aplikasi Bela Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

d. Dukungan terhadap Aspek *Market*

Dukungan Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap Aspek *Market* **telah** dilaksanakan yaitu:

- 1) Pemerintah Provinsi Gorontalo **telah** memiliki atau menetapkan pengelola e-Katalog lokal sesuai SK Gubernur Gorontalo 357/4/IX/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Pengelola Katalog Elektronik Lokal Provinsi Gorontalo;
- 2) Pemerintah Provinsi Gorontalo **belum** memiliki kebijakan terkait kemudahan penyedia barang/jasa untuk masuk dalam katalog lokal. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Sekretaris Daerah telah melakukan usaha dengan bersurat kepada Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi

LKPP perihal permohonan percepatan proses katalog lokal sehubungan dengan penginputan RUP Tahun Anggaran 2022 pada aplikasi SiRUP pada seluruh OPD khusus metode Pengadaan Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan secara *e-Purchasing*.

- 3) Pemerintah Provinsi Gorontalo **telah** berpartisipasi dalam P3DN melalui belanja produk pada Toko Daring dan/atau e-Katalog.

2. Reviu Implementasi P3DN

a. Implementasi Kebijakan dan Dukungan Pemda dalam P3DN.

1) Aspek *Demand*

- a) Pemerintah Provinsi Gorontalo **telah** merencanakan untuk mengalokasikan proporsi PBJ minimal 40% untuk penggunaan produk UMKK dari hasil produksi dalam negeri.

Pemerintah Provinsi Gorontalo, berdasarkan RUP (Data PMP-LKPP s.d. 30 November 2022), telah merencanakan PBJ melalui Penyedia sebesar Rp730.615.298.545,00 dengan jumlah paket sebanyak 6.501 paket. Dari nilai tersebut sebesar Rp614.998.985.754,00 atau 84,17% menggunakan PDN dan sebesar Rp453.706.938.850,00 atau 62,09% menggunakan produk UMKK.

Hal tersebut menunjukkan Pemerintah Provinsi Gorontalo telah berkomitmen terhadap penggunaan PDN dan UMKK.

- b) Uji petik kepatuhan penggunaan PDN pada 27 dokumen perencanaan PBJ (7 kontrak konstruksi, 1 kontrak jasa/konsultasi, dan 19 kontrak pengadaan barang) berupa KAK, HPS dan rancangan kontrak, menunjukkan kondisi sebagai berikut:
 - Sebanyak 14 atau 51,85% dokumen PBJ yang diuji petik (KAK, rancangan kontrak) **telah** mencantumkan kewajiban penggunaan PDN; dan
 - Sebanyak 13 atau 48,14% dokumen PBJ yang diuji petik (KAK, rancangan kontrak) **belum** mencantumkan kewajiban penggunaan PDN;

Hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman PPK terkait implementasi P3DN dalam belanja modal, barang dan jasa.

- c) Uji petik atas kepatuhan penggunaan PDN atas 27 proses evaluasi dokumen pada saat evaluasi penawaran PBJ, diketahui bahwa sebanyak 27 atau 100% dari 27 proses evaluasi penawaran yang diuji petik **belum** memperhitungkan persentase TKDN dan persentase preferensi harga yang akan diberikan.

Penyebab evaluasi penawaran belum mempertimbangkan persentase TKDN dalam penentuan pemenang adalah kurangnya pemahaman panitia pengadaan terkait pentingnya TKDN dalam pengadaan.

- d) Uji petik atas kepatuhan penggunaan PDN pada 27 dokumen kontrak/perjanjian PBJ sebagai berikut:

(1) Sebanyak 9 atau 33,33% dari 27 dokumen kontrak yang diuji petik **telah** mencantumkan kewajiban penggunaan produksi dalam negeri dan persentase TKDNnya;

(2) Sebanyak 18 atau 66,67% dari 27 dokumen kontrak yang diuji petik **belum** mencantumkan kewajiban penggunaan produksi dalam negeri dan persentase TKDNnya.

Penyebab dokumen kontrak tidak mencantumkan kewajiban penggunaan PDN dan persentase TKDN kurangnya pemahaman PPK terkait pentingnya TKDN dalam pengadaan.

- e) Tidak terdapat informasi terkait PDN yang memiliki TKDN 25% dan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% sehingga pengujian nilai impor atas barang tersebut tidak dapat dilakukan.

2) Aspek *Supply*

Berdasarkan hasil uji petik diketahui bahwa:

- a) Produk-produk yang pada umumnya masih diimpor oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo berupa peralatan peraga pendidikan, seperti: *Work Bench, GPS Plotter with Echo Sounder, Electronic Compass with GPS, Fish Finder* dan *Marine Radar with AIS*. Hal ini disebabkan tidak tersedianya PDN sebagai substitusi atas barang-barang impor tersebut.

- b) Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan belum melakukan fasilitasi sertifikasi TKDN dan fasilitasi peningkatan kualitas produk-produk lokal. Hal tersebut disebabkan belum adanya dukungan anggaran operasional dalam fasilitasi sertifikasi serta kurangnya sosialisasi dari Dinas kepada pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa untuk melakukan peningkatan kualitas produk lokal.
- 3) *Aspek Market*
- a) Kebijakan Pemda mendorong katalog lokal
Untuk mendorong penyedia menayangkan produknya dalam katalog lokal, Pemda belum memberikan fasilitasi sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah Provinsi Gorontalo belum menetapkan prosedur yang jelas dan sederhana untuk pendaftaran dan penayangan produk lokal dalam katalog lokal.
 - (2) Pemerintah Provinsi Gorontalo belum memfasilitasi pendaftaran penayangan produk dalam katalog lokal dalam mall layanan publik
 - b) Analisis PDN dalam Katalog Lokal
Dari analisis atas produk dalam katalog lokal yang dinyatakan sebagai PDN tidak terdapat produk impor yang diklaim sebagai PDN.
 - c) Realisasi pengadaan melalui e-katalog
Sampai dengan saat reviu berakhir, realisasi pembelian melalui e-katalog lokal dari seluruh realisasi PBJ tidak didapatkan.

b. Uji Validitas Perhitungan PDN dan TKDN

- 1) Hasil uji validitas perhitungan PDN
Hasil uji validitas secara uji petik atas 42,89% realisasi PDN dalam bentuk komitmen/kontrak/dokumen lain yang dipersamakan menunjukkan bahwa validitas atas klaim PDN oleh Pemda sebesar 61,73%, dengan uraian sebagai berikut.

No	Jenis Pengadaan	Realisasi PBJ sd 30-11-22	Realisasi PBJ-PDN sd 30-11-22	Paket Diuji Petik	Nilai PBJ-PDN Diuji Petik	Nilai PDN atas PBJ PDN Diuji Petik	Nilai PDN Sampel Tak akurat	% Akurasi Terhadap Sampel	Estimasi PDN Valid atas seluruh PBJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 7:6)	(10 = 98*4)
1.	Barang/Jasa			20 Paket	21,2 M	21,2 M	9,4 M		
2.	Konstruksi			7 Paket	122,8 M	122,8 M	29,6 M		
	Total	482 M	337 M	27 Paket	144 M	144 M	39 M	61,73%	298 M

- Keterangan :
1. Nilai PBJ-PDN diuji petik adalah Nilai Total Item yang Diuji.
 2. Nilai PDN Sampel tidak akurat berasal dari impor dan ketidaktersediaan data
 3. Uji petik dilakukan terhadap 27 paket kontrak

2) Hasil uji validitas perhitungan TKDN

Hasil uji validitas perhitungan TKDN secara uji petik atas 100% klaim TKDN menunjukkan bahwa senilai Rp75.279.123.320,00 atau 73,98% dari klaim TKDN dapat dihitung dengan dokumen pendukung berupa perkiraan perhitungan PPK.

Hasil uji diuraikan sebagai berikut:

No	Jenis Pengadaan	Realisasi PBJ-PDN	Paket Disampel	Nilai PBJ-PDN Disampel	Nilai klaim TKDN	Nilai TKDN Valid	Nilai TKDN Tak valid	Tak Dapat Dihitung (<i>Disclaimer</i>)
1.	Barang/Jasa		20 Paket	21,2 M	17,7 M	9,2 M	-	2,7 M
2.	Konstruksi		7 Paket	122,8 M	83,3 M	66 M	0,18 M	-
	Total	337 M	27 Paket	144 M	101 M	75,2 M	0,18 M	2,7 M

c. Pengendalian dan Pengawasan

Hasil Reviu Terhadap Aspek Pengendalian dan Pengawasan P3DN

- 1) PPK **telah** melakukan reviu kinerja penyedia melalui Aplikasi SIKAP.
- 2) OPD teknis **telah** melakukan monitoring dan reviu terhadap implementasi P3DN. Namun demikian, pelaksanaan monitoring dan reviu belum memadai dan belum didokumentasikan secara komprehensif.
- 3) APIP Daerah belum melakukan pengawasan terhadap implementasi P3DN. Hal ini disebabkan P3DN merupakan hal yang baru sehingga belum masuk dalam PKPT. Namun demikian pemantauan/monitoring melalui aplikasi Simwas P3DN telah dilakukan.

G. Praktik Baik dalam Mendorong P3DN

Sesuai Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 123/4/III/2022 tanggal 23 Maret 2022, Pemda telah menugaskan Tim P3DN dan telah melaksanakan upaya mandiri P3DN, antara lain:

1. Melakukan promosi dan sosialisasi mengenai Produk Dalam Negeri, mendorong Pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan dan kegemaran menggunakan PDN serta memberikan akses informasi Produk Dalam Negeri;
2. Mengawasi implementasi konsistensi nilai TKDN pada produk barang/jasa berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh produsen barang/jasa yang bersangkutan;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

H. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Hambatan dalam pelaksanaan reviu P3DN Triwulan IV Tahun 2022 pada Provinsi Gorontalo:

1. Pemda tidak dapat mengakomodasi beberapa data terkait RUP-PBJ;
2. Pemda belum memperbarui data P3DN pada aplikasi SISWAS-P3DN dan menyesuaikannya dengan isian data pada SIRUP-LKPP;
3. Aturan/kebijakan P3DN yang belum cukup jelas sehingga belum dapat dipahami untuk pelaksanaannya;
4. Kurangnya pemahaman OPD terkait dengan program P3DN;
5. Belum ada anggaran dan rencana kerja Tim P3DN sehingga belum ada implementasi atas tugas dan fungsinya yang secara jelas.

I. Saran Kebijakan dan implementasi P3DN dan UMKK dalam PBJ Daerah

Atas permasalahan Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) per Triwulan IV Tahun 2022 pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, kami merekomendasikan kepada Gubernur Gorontalo agar:

1. Menyusun regulasi terkait pemberian insentif dan sanksi atas implementasi P3DN serta kebijakan preferensi harga sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 67;

2. Mengoptimalkan implementasi e-katalog lokal dan toko daring untuk meningkatkan *supply* produk dari penyedia jasa dalam rangka P3DN sesuai dengan:
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 38, ayat (2);
 - b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Diktum Kedua, angka 27, huruf b.
3. Menginstruksikan kepada:
 - a. Kepala OPD untuk:
 - 1) Menyusun spesifikasi teknis barang/jasa yang mengacu pada kemampuan industri dalam negeri sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5, ayat (1) dan (2);
 - 2) Menyusun spesifikasi teknis barang/jasa sesuai Daftar Inventarisasi Barang Produksi Dalam Negeri Bersertifikat TKDN.
 - b. Panitia Pengadaan agar mengevaluasi penawaran penyedia sehubungan dengan P3DN terhadap tiap kontrak yang telah diajukan;
 - c. Tim P3DN, agar meningkatkan kegiatan sosialisasi, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan P3DN dalam PBJ di lingkungan OPD Pemerintah Provinsi Gorontalo;
 - d. Inspektur Provinsi Gorontalo agar melakukan reuiu dan monitoring implementasi P3DN secara berkelanjutan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Heru Tarsila

Tembusan Yth. :

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
3. Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo

Hasil Uji Validitas PDN

No	Id RUP	Nama Paket	Nilai Kontrak (Tanpa Pajak)	PBJ-PDN Disampel		PDN atas PBJ PDN Disampel	
				Jumlah Item	Nilai Barang	Jumlah (Rp)	
						Import	PDN
1	31947442	Supervisi Pembangunan Kanal Banjir Tanggidaa	516,828,000	12	178,000,000	-	178,000,000
2	30352233	Pengadaan Pakan Konsentrat Ternak Sapi dan Pakan Konsentrat Ternak Kambing	300,300,000	1	300,299,736	-	300,299,736
3	31275719	Pengadaan Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada keluarga (Zona 3- Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo)	2,231,031,600	1	2,231,031,600	-	2,231,031,600
4	30353554	Pengadaan Pakan Ternak Ayam Starter dan Pakan Ternak Ayam Layer	1,114,537,500	2	1,114,537,500	-	1,114,537,500
5	31913437	Pengadaan Sarana Pemasaran Ikan (motor bercoolbox)	504,213,512	1	504,213,512	-	504,213,512
6	31274654	Pengadaan Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada keluarga (Zona 1- Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato)	3,221,991,037	1	3,221,991,293	-	3,221,991,293
7	31275277	Pengadaan Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada keluarga (Zona 2- Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara)	2,338,500,430	1	2,338,500,430	-	2,338,500,430
8	30368517	Pengadaan sapi	1,223,337,500	1	1,223,337,500	-	1,223,337,500
9	31380551	Pengadaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	199,732,000	3	199,732,000	-	199,732,000
10	32034148	Pengadaan peralatan praktik utama SMK Negeri seProvinsi Gorontalo	2,886,764,545	33	2,886,764,545	2,492,606,454	394,158,091
11	32034371	Pengadaan peralatan praktik utama SMK Swasta seProvinsi Gorontalo	357,195,455	2	46,450,000	-	46,450,000
12	32034148	Pengadaan peralatan praktik utama SMK Negeri seProvinsi Gorontalo	168,203,636	1	168,203,636	168,203,636	-
13	32034371	Pengadaan peralatan praktik utama SMK Swasta seProvinsi Gorontalo	120,727,273	1	120,727,273	120,727,273	-
14	32034371	Pengadaan peralatan praktik utama SMK Swasta seProvinsi Gorontalo	464,335,273	11	464,334,455	464,334,455	-
15	32034371	Pengadaan peralatan praktik utama SMK Swasta seProvinsi Gorontalo	501,889,364	11	501,889,364	393,621,909	108,267,455
16	32034513	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SMK Swasta seProvinsi Gorontalo	111,800,000	4	111,800,000	109,363,636	2,436,364
17	32034371	Pengadaan peralatan praktik utama SMK Swasta seProvinsi Gorontalo	723,545,273	6	723,545,273	723,545,273	-
18	32034513	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SMK Swasta seProvinsi Gorontalo	113,636,364	4	113,636,364	113,636,364	-
19	32034148	Pengadaan peralatan praktik utama SMK Negeri seProvinsi Gorontalo	1,274,160,000	4	1,274,160,000	1,274,160,000	-
20	32034148	Pengadaan peralatan praktik utama SMK Negeri seProvinsi Gorontalo	3,571,338,364	32	3,571,338,364	3,124,742,364	446,596,000
21	30337109	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tabulo Latula	9,226,672,923	39	9,163,214,104	-	8,908,560,832
22	31785942	Pembangunan Kanal Banjir Tanggidaa	26,806,142,281	58	26,806,142,281	2,103,559,266	24,702,583,015
23	31951697	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir Tanggidaa	12,371,168,185	155	12,371,168,185	-	12,371,168,185
24	31812531	Peningkatan Jalan Taluditi - Wonggarasi (PEN 2021)	29,042,990,000	45	29,042,990,197	-	29,042,990,197
25	31812576	Rekonstruksi Jl. Prof. Dr. John A. Katili (PEN 2021)	33,504,294,133	20	5,936,438,836	4,252,500,623	1,683,933,510
26	30417265	Pengawasan Pembangunan Jalan Tangkobu - Pentadu (Segmen Apitalau-Olibuu)	5,695,999,999	-	-	-	-
27	34725429	Peningkatan Jalan Tangkobu - Pentadu (Segment Tangkobu-Karya Murni) (DAK 2022)	5,626,604,200	-	-	-	-
	TOTAL		144,217,938,845		104,614,446,447	15,341,001,252	89,018,787,220

Hasil Uji Validitas TKDN

No	Id RUP	Nama Paket	Nilai Kontrak (Tanpa Pajak)	Klaim Nilai TKDN	Penguji TKDN					
					Disclaimer		Tidak Valid		Valid	
					Nilai Rupiah	Jumlah Item	Nilai Rupiah	Jumlah Item	Nilai Rupiah	Jumlah Item
1	31947442	Supervisi Pembangunan Kanal Banjir Tanggidaa	516,828,000	178,000,000.00	-	-	-	-	12	178,000,000.00
2	30352233	Pengadaan Pakan Konsentrat Ternak Sapi dan Pakan Konsentrat Ternak Kambing	300,300,000	300,300,000	-	-	-	-	1	300,300,000
3	31275719	Pengadaan Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada keluarga (Zona 3- Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo)	2,231,031,600	2,231,031,600	1	2,231,031,600.00	-	-	-	-
4	31785942	Pembangunan Kanal Banjir Tanggidaa	26,806,142,281	26,806,142,281	-	-	-	-	30	14,485,299,015.37
5	30353554	Pengadaan Pakan Ternak Ayam Starter dan Pakan Ternak Ayam Layer	1,114,537,500	1,114,537,500	-	-	-	-	2	1,114,537,500.00
6	31913437	Pengadaan Sarana Pemasaran Ikan (motor bercoolbox)	504,213,512	504,213,512	1	504,213,511.80	-	-	-	-
7	31274654	Pengadaan Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada keluarga (Zona 1- Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato)	3,221,991,037	3,221,991,293	-	-	-	-	1	3,221,991,293.20
8	31275277	Pengadaan Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada keluarga (Zona 2- Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara)	2,338,500,430	2,338,500,430	-	-	-	-	1	2,338,500,430.00
9	30368517	Pengadaan sapi	1,223,337,500	1,223,337,500	-	-	-	-	1	1,223,337,500.00
10	31380551	Pengadaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	199,732,000	199,732,000	-	-	-	-	3	199,732,000.00
11	32034148	Pengadaan peralatan praktik utama SMK Negeri seProvinsi Gorontalo	2,886,764,545	2,886,764,545	-	-	-	-	3	394,158,090.89
12	32034371	Pengadaan peralatan praktik utama SMK Swasta seProvinsi Gorontalo	357,195,455	46,450,000.00	-	-	-	-	2	46,450,000.00
13	32034148	Pengadaan peralatan praktik utama SMK Negeri seProvinsi Gorontalo	168,203,636	-	-	-	-	-	-	-
14	32034371	Pengadaan peralatan praktik utama SMK Swasta seProvinsi Gorontalo	120,727,273	-	-	-	-	-	-	-
15	32034371	Pengadaan peralatan praktik utama SMK Swasta seProvinsi Gorontalo	464,335,273	-	-	-	-	-	-	-
16	32034371	Pengadaan peralatan praktik utama SMK Swasta seProvinsi Gorontalo	501,889,364	501,889,364	-	-	-	-	2	108,267,454.54
17	32034513	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SMK Swasta seProvinsi Gorontalo	111,800,000	111,800,000	-	-	-	-	2	2,436,363.63
18	32034371	Pengadaan peralatan praktik utama SMK Swasta seProvinsi Gorontalo	723,545,273	-	-	-	-	-	-	-
19	32034513	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SMK Swasta seProvinsi Gorontalo	113,636,364	-	-	-	-	-	-	-
20	32034148	Pengadaan peralatan praktik utama SMK Negeri seProvinsi Gorontalo	1,274,160,000	-	-	-	-	-	-	-
21	32034148	Pengadaan peralatan praktik utama SMK Negeri seProvinsi Gorontalo	3,571,338,364	3,571,338,364	-	-	-	-	4	94,779,327.03
22	30337109	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tabulo Latula	9,226,672,923	9,163,214,104	-	-	-	-	39	8,908,531,961.21
23	31951697	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir Tanggidaa	12,371,168,185	12,371,168,185.68	-	-	-	-	155	12,371,168,185.68
24	31812531	Peningkatan Jalan Taluditi - Wonggarasi (PEN 2021)	29,042,990,000	29,042,990,197.42	-	-	-	-	45	29,042,990,197.42
25	31812576	Rekonstruksi Jl. Prof. Dr. John A. Katili (PEN 2021)	33,504,294,133	5,936,438,836	-	-	4	18,301,239.33	2	1,248,644,000.87
26	30417265	Pengawasan Pembangunan Jalan Tangkoku - Pentadu (Segmen Apitalau-Olibuu)	5,695,999,999	-	-	-	-	-	-	-
27	34725429	Peningkatan Jalan Tangkoku - Pentadu (Segment Tangkoku-Karya Murni) (DAK 2022)	5,626,604,200	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			144,217,938,845	101,749,839,713		2,735,245,112		18,301,239		75,279,123,320